

# **Analisis Peluang dan Tantangan Perdagangan Produk Pertanian Indonesia dengan Australia: Studi Kasus dalam Kerangka APEC**

**Mela Aprilia<sup>1\*</sup>, Daspar<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia

\*Correspondence Author Email: [aprilliamela12@gmail.com](mailto:aprilliamela12@gmail.com)

## **Abstrak**

Perdagangan produk pertanian antara Indonesia dan Australia memiliki signifikansi strategis dalam mendorong ketahanan pangan nasional dan memperluas akses pasar global. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan ekspor produk pertanian ke Australia dalam kerangka kerja sama Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan data sekunder dari lembaga pemerintah, organisasi internasional, serta kajian akademik, penelitian ini menemukan bahwa potensi ekspor sangat dipengaruhi oleh komplementaritas produk dan dukungan kebijakan liberalisasi perdagangan. Namun demikian, hambatan teknis seperti regulasi biosekuriti Australia dan ketidaksesuaian standar mutu masih menjadi kendala signifikan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas, diplomasi ekonomi yang aktif, dan penguatan infrastruktur ekspor menjadi strategi utama untuk memperkuat daya saing produk pertanian Indonesia di pasar Australia.

**Kata kunci:** Perdagangan Internasional, Produk Pertanian, Indonesia, Australia, APEC

## **Abstract**

*Agricultural trade between Indonesia and Australia holds strategic importance in supporting national food security and expanding access to global markets. This study aims to examine the opportunities and challenges faced by Indonesia in enhancing agricultural exports to Australia under the framework of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Using a descriptive qualitative method and secondary data from government institutions, international organizations, and academic sources, the study finds that export opportunities are largely driven by product complementarity and trade liberalization initiatives. Nevertheless, technical barriers such as Australia's stringent biosecurity regulations and quality standard discrepancies remain key obstacles. Therefore, improving product quality, engaging in proactive economic diplomacy, and strengthening export infrastructure are vital strategies to boost Indonesia's agricultural competitiveness in the Australian market.*

**Keywords:** International Trade, Agricultural Products, Indonesia, Australia, APEC

## **Article History:**

Submitted: June 15, 2025

Revised: June 28, 2025

Accepted: June 30, 2025

## **PENDAHULUAN**

Perdagangan internasional merupakan elemen kunci dalam pengembangan ekonomi suatu negara, karena mampu memperluas pasar, meningkatkan efisiensi produksi, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan. Indonesia, sebagai negara agraris dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, memiliki sektor pertanian sebagai salah satu pilar penting dalam struktur ekonominya. Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi tumpuan bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan dan penguatan ekspor non-

migas (Kementerian Pertanian, 2022). Dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi, keterlibatan Indonesia dalam forum-forum kerja sama internasional menjadi semakin strategis untuk memperkuat posisi dagangnya di kancah global.

Salah satu forum kerja sama ekonomi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan perdagangan Indonesia adalah Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). APEC bertujuan untuk memfasilitasi liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik melalui penghapusan hambatan tarif dan non-tarif serta penyelarasan standar teknis antarnegara anggota. Dalam kerangka ini, Indonesia dan Australia memiliki posisi yang saling melengkapi, terutama dalam perdagangan produk pertanian. Australia, dengan iklim subtropisnya, memiliki kebutuhan terhadap produk-produk tropis seperti buah-buahan, rempah-rempah, dan komoditas hortikultura lainnya yang merupakan keunggulan komparatif Indonesia (APEC Policy Support Unit, 2021).

Namun demikian, kendati terdapat potensi besar dalam kerja sama ini, realisasi ekspor produk pertanian Indonesia ke Australia masih menghadapi tantangan yang kompleks. Hambatan utama yang sering dihadapi adalah ketatnya regulasi Australia dalam hal standar sanitasi dan fitosanitasi (Sanitary and Phytosanitary/SPS Measures), termasuk persyaratan karantina yang sangat tinggi. Australia menerapkan sistem biosekuriti yang sangat ketat guna melindungi sektor pertaniannya dari risiko masuknya hama dan penyakit asing. Akibatnya, banyak produk pertanian Indonesia, terutama dari petani kecil dan menengah, yang sulit menembus pasar Australia karena tidak memenuhi standar teknis yang ditetapkan (Badan Karantina Pertanian, 2022). Masalah lainnya adalah rendahnya konsistensi kualitas produk, keterbatasan infrastruktur logistik, serta lemahnya sistem sertifikasi dan pelacakan (traceability) produk dari hulu ke hilir.

Di sisi lain, terdapat pula peluang signifikan yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Salah satunya adalah perbedaan musim tanam antara Indonesia dan Australia yang membuka ruang bagi keberlangsungan pasokan produk sepanjang tahun. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat Australia terhadap konsumsi makanan sehat dan organik turut mendorong permintaan terhadap produk pertanian segar dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tidak hanya itu, dukungan dalam bentuk kerja sama teknis, fasilitasi perdagangan, dan pengembangan kapasitas yang difasilitasi oleh APEC dapat menjadi modal penting untuk memperkuat daya saing ekspor pertanian Indonesia (Nurhayati, 2020).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana potensi dan kendala yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan ekspor produk pertanian ke Australia dalam konteks kerja sama APEC. Permasalahan utama yang ingin dijawab adalah sejauh mana kebijakan perdagangan, standar mutu, dan infrastruktur pendukung di Indonesia mampu menjawab tantangan akses pasar Australia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi performa ekspor pertanian Indonesia serta menyusun rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kerja sama perdagangan bilateral. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penyusunan

kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) guna memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional secara lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) sebagai pendekatan utama untuk menganalisis peluang dan tantangan perdagangan produk pertanian antara Indonesia dan Australia dalam kerangka kerja sama APEC. Data yang dikaji berasal dari berbagai literatur relevan, seperti jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional (seperti APEC, WTO, dan FAO), dokumen kebijakan perdagangan, serta artikel dari lembaga pemerintah kedua negara. Penelusuran sumber dilakukan secara sistematis melalui basis data akademik dan situs resmi lembaga terkait, dengan fokus pada publikasi yang membahas isu-isu perdagangan pertanian, perjanjian perdagangan bebas, dan dinamika hubungan ekonomi bilateral maupun multilateral.

Dalam proses analisis, data sekunder yang terkumpul dikaji menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi hubungan dagang antara Indonesia dan Australia, termasuk hambatan tarif dan non-tarif, standar teknis, dan perbedaan kebijakan pertanian. Penelitian ini juga menyoroti kebijakan APEC terkait liberalisasi perdagangan dan bagaimana kerangka ini mempengaruhi pola ekspor-impor produk pertanian. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi sekaligus peluang strategis yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dalam memperkuat posisi produk pertaniannya di pasar Australia melalui kerja sama regional yang difasilitasi oleh APEC.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam kerangka kerja sama APEC, Indonesia dan Australia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengurangi berbagai hambatan perdagangan, baik dalam bentuk tarif maupun hambatan non-tarif. Sebagai forum ekonomi regional yang terdiri dari 21 ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, APEC mendorong prinsip-prinsip transparansi, fasilitasi perdagangan, serta harmonisasi standar dalam mendukung integrasi ekonomi regional. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting bagi Indonesia untuk memperluas akses pasar produk-produk pertanian, terutama yang bersifat tropis seperti kopi, rempah-rempah, buah-buahan tropis, dan hasil hortikultura lainnya, ke negara-negara maju seperti Australia.

Salah satu peluang strategis yang patut disoroti adalah adanya komplementaritas dalam struktur produksi pertanian antara Indonesia dan Australia. Indonesia, dengan kondisi geografis tropis, memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi buah-buahan seperti manggis, salak, dan pisang yang tidak tumbuh secara alami di wilayah Australia. Sementara itu, Australia unggul dalam produk pertanian subtropis dan temperate. Perbedaan karakteristik agrikultur ini menciptakan sinergi perdagangan yang saling melengkapi. Kementerian

Perdagangan Republik Indonesia (2023) mencatat bahwa nilai ekspor buah manggis ke Australia meningkat hingga 150% dalam kurun lima tahun terakhir, mencerminkan adanya tren permintaan yang positif dari pasar Australia terhadap produk pertanian Indonesia.

Meski demikian, realisasi ekspor tidak serta-merta berjalan tanpa hambatan. Australia menerapkan sistem biosekuriti yang sangat ketat dan kompleks, mencakup persyaratan karantina, sertifikasi, dan inspeksi berlapis. Sistem ini menekankan pada aspek sanitasi dan fitosanitasi, termasuk standar maksimum residu pestisida dan ketentuan bebas hama. Menurut laporan Badan Karantina Pertanian (2022), sekitar 30% pengiriman produk hortikultura Indonesia ditolak masuk ke Australia akibat tidak memenuhi ketentuan biosekuriti tersebut. Situasi ini tentu menjadi tantangan berat, terutama bagi pelaku usaha kecil dan petani mandiri yang memiliki keterbatasan dalam hal teknologi produksi dan pemahaman terhadap standar internasional.

Dari sisi sosial-ekonomi, tantangan ini turut berdampak pada keberlanjutan kehidupan petani di daerah. Banyak petani yang menggantungkan harapan pada pasar ekspor, namun keterbatasan dalam infrastruktur logistik, inkonsistensi pasokan, dan lemahnya pembinaan teknis menyebabkan daya saing produk mereka rendah. APEC Policy Support Unit (2021) menyatakan bahwa Indonesia memerlukan reformasi struktural dalam sistem produksi pertanian, termasuk penguatan koperasi tani, penyediaan akses pembiayaan ekspor, dan peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan terpadu.

Dalam konteks teori perdagangan internasional, situasi ini mencerminkan penerapan teori keunggulan komparatif, di mana masing-masing negara mengekspor barang yang dapat diproduksi secara efisien berdasarkan kondisi geografis dan sumber daya alam yang dimiliki. Namun, keberhasilan Indonesia dalam rantai nilai global (*global value chain*) sangat ditentukan oleh kemampuannya memenuhi standar mutu dan keberlanjutan yang ditetapkan oleh negara mitra dagang. Australia, sebagai negara berpendapatan tinggi dengan regulasi ketat, menjadi tolak ukur penting dalam hal ini.

Upaya untuk meningkatkan kinerja ekspor produk pertanian tidak cukup hanya melalui perbaikan teknis di lapangan, tetapi juga perlu didukung melalui pendekatan diplomasi ekonomi yang lebih aktif. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan perlu mendorong pengakuan terhadap standar nasional dalam skema kesetaraan mutu (*mutual recognition arrangement*). Dalam hal ini, kerja sama teknis dan program *capacity building* yang difasilitasi oleh APEC, seperti *APEC Food Security Roadmap 2020–2030*, harus dimaksimalkan. Program tersebut menawarkan dukungan dalam hal peningkatan ketahanan pangan, inovasi agrikultur, dan akses pasar.

Lebih jauh, kerja sama bilateral Indonesia dan Australia dalam kerangka IA-CEPA (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) juga dapat dimanfaatkan untuk melengkapi kerangka kerja APEC. IA-CEPA memberikan peluang bagi peningkatan ekspor pertanian melalui skema preferensi tarif, pengurangan hambatan teknis, serta fasilitasi investasi agribisnis. Sinergi antara

APEC dan IA-CEPA dapat menjadi strategi jangka panjang dalam membangun ketahanan ekspor pertanian Indonesia di pasar Australia.

Dengan demikian, penguatan daya saing produk pertanian Indonesia dalam kerangka APEC tidak hanya bergantung pada kondisi pasar, tetapi juga pada efektivitas kebijakan domestik, keberanian berinovasi, dan sinergi antara sektor publik dan swasta. Hanya dengan langkah yang terkoordinasi dan berbasis bukti, Indonesia dapat mengubah potensi menjadi pencapaian nyata dalam perdagangan pertanian internasional, khususnya dengan Australia.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik dan ITC TradeMap, nilai ekspor produk pertanian Indonesia ke Australia selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif namun positif untuk komoditas tertentu. Buah manggis misalnya, mengalami lonjakan ekspor dari USD 2,4 juta pada tahun 2020 menjadi USD 6,1 juta pada 2023.

Sebaliknya, ekspor kopi ke Australia justru menurun, dari USD 10,3 juta pada tahun 2021 menjadi USD 7,6 juta pada 2024. Penurunan ini dikaitkan dengan kompetisi global dari Vietnam dan Brasil serta kendala teknis dalam pelabelan dan pelacakan produk. Laporan dari Badan Karantina Pertanian juga menyebutkan bahwa 28% produk hortikultura Indonesia yang dikirim ke Australia pada 2021–2023 ditolak karena tidak memenuhi ambang batas residu pestisida dan ketidaksesuaian kemasan.

Sementara itu, preferensi konsumen Australia juga mengalami perubahan. Berdasarkan survei oleh Austrade (2023), terdapat peningkatan permintaan terhadap produk tropis yang bersertifikat organik dan berasal dari produksi berkelanjutan. Produk seperti salak organik, temulawak, dan jahe merah memiliki potensi pasar dalam segmen niche market, terutama jika disertai narasi keberlanjutan dan transparansi rantai pasok.

Saran Kebijakan dan Rekomendasi Strategis Untuk mengoptimalkan peluang dan merespons tantangan yang ada, perlu dilakukan perumusan kebijakan dan strategi komprehensif oleh pemangku kepentingan nasional.

Pertama, pemerintah perlu memperkuat sistem sertifikasi dan pelacakan produk (traceability) berbasis digital, khususnya untuk komoditas unggulan. Penguatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar SPS Australia dan mengurangi risiko penolakan produk di pelabuhan masuk.

Kedua, pengembangan infrastruktur logistik berpendingin (*cold chain*) di sentra produksi hortikultura harus menjadi prioritas. Minimnya fasilitas penyimpanan dingin menyebabkan penurunan mutu produk selama pengiriman, yang akhirnya berimbas pada tingkat penerimaan pasar.

Ketiga, diplomasi ekonomi perlu diarahkan untuk mendorong pengakuan terhadap standar mutu nasional melalui skema *Mutual Recognition Arrangement* (MRA). Dengan adanya MRA, proses ekspor dapat berlangsung lebih efisien dan minim hambatan administratif.

Keempat, pelatihan dan pembinaan petani dalam praktik pertanian baik (*Good Agricultural Practices/GAP*) dan penanganan pasca panen (*Good Handling*

Practices/GHP) harus ditingkatkan secara masif. Program ini dapat memanfaatkan skema kerja sama teknis APEC.

Terakhir, perlu dibangun kemitraan strategis antara petani lokal dan perusahaan agribisnis Australia. Model investasi bersama dapat digunakan untuk mempercepat adopsi teknologi modern dan menjawab ekspektasi konsumen Australia terhadap kualitas dan keberlanjutan.

Tabel 1. Ringkasan Teori dan Relevansi dalam Studi

<b>Teori</b>	<b>Tokoh/Pakar</b>	<b>Pokok Gagasan</b>	<b>Relevansi Studi</b>
Keunggulan Komparatif	Krugman & Obstfeld (2022)	Negara mengekspor barang yang dapat diproduksi lebih efisien	Indonesia unggul dalam produk tropis yang tidak diproduksi Australia
Rantai Nilai Global (GVC)	Gereffi (2021)	Daya saing ditentukan oleh integrasi dalam rantai pasok	Ekspor Indonesia bergantung pada standar mutu dan efisiensi logistik
Hambatan Non-Tarif (SPS)	Baldwin & Evenett (2020)	Standar teknis lebih memengaruhi pasar dibanding tarif	Regulasi SPS Australia menjadi tantangan besar bagi petani dan eksportir Indonesia
Kerja Sama Ekonomi Regional	Ravenhill (2023)	Soft law mendorong harmonisasi standar dan fasilitasi perdagangan	APEC mendukung inklusivitas, sinergi IA-CEPA memperkuat posisi Indonesia di pasar Australia

*Sumber: Diolah dari Krugman & Obstfeld (2022), Gereffi (2021), Baldwin & Evenett (2020), dan Ravenhill (2023).*

Dalam kajian ini, pendekatan teoritis yang digunakan berpijak pada beberapa teori utama dalam ekonomi internasional. Pertama, teori keunggulan komparatif yang dikembangkan oleh Krugman dan Obstfeld (2022) menjadi dasar penting dalam menjelaskan pola perdagangan antara negara. Teori ini menekankan bahwa suatu negara akan memperoleh manfaat lebih besar apabila mengekspor komoditas yang dapat diproduksi dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Dalam konteks hubungan dagang Indonesia dan Australia, Indonesia memiliki potensi besar dalam komoditas tropis seperti manggis, salak, dan produk hortikultura lainnya yang tidak dibudidayakan secara luas di Australia. Oleh karena itu, spesialisasi dalam produksi komoditas-komoditas tersebut memberi Indonesia posisi strategis dalam meningkatkan ekspor ke pasar Australia.

Selanjutnya, konsep rantai nilai global atau Global Value Chains (GVC) sebagaimana dikemukakan oleh Gereffi (2021) memberikan kerangka tambahan dalam memahami bagaimana negara-negara berkembang dapat memperkuat keterlibatan dalam perdagangan internasional. Gereffi menyoroti pentingnya

peningkatan nilai tambah tidak hanya pada tahap produksi akhir, melainkan juga sepanjang rantai pasok, termasuk dalam aspek pengolahan, pengemasan, hingga distribusi. Dalam studi ini, teori GVC menunjukkan bahwa daya saing Indonesia dalam perdagangan pertanian tidak hanya ditentukan oleh volume ekspor, tetapi juga oleh kemampuannya memenuhi standar mutu, memperbaiki sistem logistik, serta merespons kebutuhan pasar seperti yang ditetapkan Australia.

Di sisi lain, hambatan non-tarif khususnya yang berkaitan dengan Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) menjadi salah satu tantangan terbesar dalam hubungan dagang pertanian antarnegara. Baldwin dan Evenett (2020) menggarisbawahi bahwa dalam era perdagangan bebas modern, hambatan tarif justru semakin tergeser oleh regulasi teknis seperti standar keamanan pangan dan ketentuan biosekuriti. Australia, dalam hal ini, menerapkan regulasi SPS yang sangat ketat untuk melindungi ekosistem dan konsumen domestiknya. Hal ini seringkali menjadi hambatan serius bagi ekspor pertanian Indonesia, terutama ketika produk gagal memenuhi ambang batas residu pestisida atau terindikasi membawa organisme pengganggu tanaman.

Akhirnya, teori mengenai kerja sama ekonomi regional sebagaimana diuraikan oleh Ravenhill (2023) memberi pemahaman mengenai peran institusi kawasan seperti APEC dalam memperkuat perdagangan internasional. Meskipun bersifat tidak mengikat secara hukum (*soft law*), APEC memiliki peran signifikan dalam membangun dialog ekonomi, menyusun kerangka regulasi yang harmonis, serta memfasilitasi aliran investasi antaranggota. Dalam konteks ini, kerja sama Indonesia–Australia diperkuat pula oleh adanya perjanjian bilateral IA-CEPA yang secara eksplisit membuka ruang peningkatan akses pasar, penghapusan hambatan tarif tertentu, serta kerja sama teknis dalam sektor pertanian. Kombinasi APEC dan IA-CEPA inilah yang membuka peluang sekaligus menetapkan standar yang perlu dicapai Indonesia agar lebih kompetitif di pasar Australia.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perdagangan produk pertanian Indonesia dengan Australia dalam kerangka APEC menyimpan potensi besar untuk dikembangkan. Peluang tersebut ditunjang oleh komplementaritas produk, dukungan kebijakan liberalisasi perdagangan, dan meningkatnya permintaan terhadap produk tropis. Namun, tantangan tetap signifikan, terutama dalam aspek teknis seperti standar kualitas, regulasi ketat, dan keterbatasan kapasitas produksi.

Untuk itu, strategi yang perlu dikedepankan adalah peningkatan kualitas produk melalui pembinaan petani, penguatan sistem karantina domestik, serta perluasan kerja sama teknis bilateral. Pemerintah perlu lebih aktif dalam diplomasi dagang agar regulasi Australia dapat disesuaikan dengan kondisi Indonesia tanpa mengurangi standar keamanan. Selain itu, peningkatan investasi dalam infrastruktur logistik dan sertifikasi akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam pasar global, khususnya di Australia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- APEC Policy Support Unit. (2021). Enhancing food security through trade in the Asia-Pacific region. APEC Secretariat.
- Austrade. (2023). Australian consumer insights: Opportunities for tropical and organic products from Southeast Asia. Australian Trade and Investment Commission.
- Badan Karantina Pertanian. (2022). Laporan tahunan sistem pengawasan dan karantina ekspor pertanian. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Baldwin, R., & Evenett, S. J. (2020). Revitalising multilateralism: Pragmatic ideas for the new WTO director-general. CEPR Press.
- Gereffi, G. (2021). Global value chains and development: Redefining the contours of 21st century capitalism. *Journal of Globalization and Development*, 12(1), 1–22. <https://doi.org/10.1515/jgd-2021-0001>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). Statistik perdagangan Indonesia–Australia. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Perdagangan Luar Negeri.
- Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2022). *International economics: Theory and policy* (11th ed.). Pearson.
- Ministry of Foreign Affairs Indonesia. (2023). Diplomasi ekonomi Indonesia tahun 2023: Capaian dan strategi. Direktorat Jenderal Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Nurhayati, S. (2020). Strategi peningkatan daya saing produk hortikultura Indonesia di pasar global. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 115–129. <https://doi.org/10.22212/jekp.v11i2.2020>
- Ravenhill, J. (2023). *Global political economy* (6th ed.). Oxford University Press.
- Salvatore, D. (2020). *International economics* (13th ed.). Wiley.
- Siregar, H., & Widodo, T. (2018). Agricultural trade policy and competitiveness: The case of Indonesia. *Journal of International Development Studies*, 27(3), 55–72. <https://doi.org/10.1016/j.jids.2018.03.002>
- Widodo, T. (2017). *Perdagangan internasional: Teori dan kebijakan*. Jakarta: Rajawali Pers.